



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

22. Dinas Kehutanan;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penghubung Provinsi;
34. Inspektorat Daerah;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 telah diselaraskan dengan perkembangan dinamika internal serta kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, merupakan telaahan bagi tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Diharapkan ke depannya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat mereposisi dan merevitalisasi diri, serta menentukan berbagai kebijaksanaan dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam meningkatkan eksistensi dan perannya bagi kemajuan Kalimantan Timur khususnya di bidang riset dan inovasi.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pengembangan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026.

Samarinda, 14 Agustus 2025



Kepala
Dr. M. Ir. H. Fitriansyah, S.T., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19731127 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2024-2026	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026	59
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah Tahun 2026	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	63
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	79
BAB V PENUTUP	91

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 ...	6
Tabel 2.2	Perhitungan Indikator Kinerja Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	21
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Balitbangda Prov. Kaltim	24
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	34
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi/Kabupaten/Kota	49
Tabel 3.1	Telaahan kebijakan dari RPJPN Tahun 2025-2024, RPJPD 2025-2045, RPJMD 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026	60
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Urusan Penelitian dan Pengembangan	64
Tabel 3.3	Strategi dan Arah kebijakan riset dan inovasi Tahun 2025-2029	66
Tabel 3.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2026	67
Tabel 2.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2026	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan segala potensi, permasalahan dan tantangan yang ada. Peran strategis perencanaan ini diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Lebih lanjut secara lebih terperinci, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renja telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan. Renja Perangkat Daerah merupakan instrumen dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah.

Renja Perangkat Daerah memuat kondisi ideal yang seharusnya diciptakan dengan disertai penjabaran mengenai cara pencapaiannya, substansinya serta memberikan gambaran konkret terkait pengukuran target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Kesenambungan dan keselarasan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, menjadi tolok ukur dan tantangan pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah memiliki peran dalam ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3046 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun RKA dan DPA Tahun 2026, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2026 tersebut adalah tersusunnya dokumen rencana program dan kegiatan terkait kegiatan yang difokuskan pada pengembangan riset dan inovasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, yakni :

BAB I PENDAHULUAN :

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN dan SASARAN :

Memuat tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah, Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN :

Memuat tentang rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif pendanaan.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu proses peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dengan melakukan penilaian terhadap hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Evaluasi dilakukan guna mengetahui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (2024-2026)

Evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan berdasarkan pada pelaksanaan Renja Tahun 2024 yang meliputi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra
Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah										
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85	N/A	83	103,61	124,83	84		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	N/A	100	100	100,00	100		
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	90	N/A	80	100	125,00	85	60,33	70,98
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	10	11	11	100,00	10	6	60,00
5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	0	21	21	100,00	21	5	23,81
5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	0	5	5	100,00	5	2	40,00
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	%	0	N/A	0,18	0,04	22,22	0,08	0,08	100,00
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	69	46	41	41	100,00	50	0	0,00
5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	36	0	12	12	100,00	12	3	25,00
5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	0	30	30	100,00	30	6	20,00
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	%	10	N/A	20	0	0,00	15	0	0,00
5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	0	4	4	100,00	12	3	25,00
5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	3	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	%	70	N/A	40	33,00	82,50	50	13	26,66
5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	0	2	2	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	1	100,00
5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	90	25	25	17	68,00	30	4	13,33
5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	90	0	30	1	3,33	30	0	0,00
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	%	95	N/A	75	100,00	133,33	85	29	0,00
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100,00	1		0,00
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	3	25,00
5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6	0	2	2	100,00	2	0	0,00
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	%	100	N/A	30	51,35	171,17	70	0	0,00
5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	0	1	1	100,00	0	0	0,00
5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	2	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	27	0	5	14	280,00	10	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perang kat Daera h Tahun 2024 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	1	0	0,00	1	0	0,00
5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	30	1	1	100,00	0	0	0,00
5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	40	1	1	100,00	0	0	0,00
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	%	100	N/A	100	100	100,00	100	21	21,25
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	3	0,00
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	3	0,00
5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	0	12	12	100,00	12	3	0,00
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	83	12	13	13	100,00	36	9	0,00
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	%	80	N/A	60	50,73	84,55	70	4,18	5,97

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perang kat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	14	0	2	2	100,00	6	0	0,00
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	6	6	6	100,00	6	0	0,00
5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	240	61	70	57	81,43	80	0	0,00
5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	3	0	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	2	2	2	100,00	4	0	0,00
5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	1	1	1	100,00	3	0	0,00
5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	100,00	2	0	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	%	75	N/A	70	60	85,71	72		
		Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	%	67	N/A	65	50	76,92	66		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	5	N/A	5	5	100,00	4		
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	3	0	2	1	50,00	1	0	0,00
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	5	4	1	1	100,00	2	0	0,00
5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	3	1	1	1	100,00	0	0	0
5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	3	2	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	4	3	2	1	50,00	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluarn Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	3	0	0	0	0	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	3	1	1	1	100,00	1	0	0,00
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	10		4	4	100,00	5	0	0,00
5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.01.0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	5	N/A	2	2	100,00	4		
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	3	0	0	0	0	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	3	4	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	5	2	1	100	0	2	0	0
5.05.02.1.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	3	0	0	0	0	1	0	0
5.05.02.1.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	3	0	0	0	0	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.02.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen	3	0	1	100	0	0	0	0
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	5	N/A	5	5	100,00	4		
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	2	0	0	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	3	2	1	200	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	3	1	1	100	0	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Peran g kat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	3	7	6	16,67	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	3	0	2	50	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	3	2	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	3	3	1	100	0	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	3	0	1	100	0	1	0	0
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	12	N/A	11	9	81,82	11		
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3	5	3	100	0	3	0	0
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	2	2	2	100	0	1	0	0
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	9	4	3	100	0	3	0	0
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	9	3	2	100	0	3	0	0
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	3	1	1	100	0	1	0	0

Dalam pencapaian target-target tersebut, Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran.

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut, dalam pelaksanaan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur terdapat 2 (dua) program yang mendukung terlaksananya Renja 2024 yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; (2) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan capaian kinerja sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah rangkaian kegiatan dan anggaran yang berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintahan daerah. Indikator-indikator yang menunjang keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

a). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan

Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan diperoleh dari Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari bulan Januari-Desember 2024, dari target nilai 83 point tercapai 86 point, sehingga tingkat capaian kinerja **melebihi target** yang ditetapkan yakni 103,61%. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Balitbangda merupakan Gambaran kinerja pelayanan Balitbangda dalam mendengarkan aspirasi Masyarakat terkait penyelenggaraan riset dan inovasi tahun 2024. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan didukung oleh kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diukur melalui kinerja “Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik” dengan target 75 % terealisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerjanya **melebihi target** (133,33%).

b). Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti

Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti diperoleh melalui perhitungan akumulasi persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu, persentase realisasi anggaran, persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik, dengan nilai realisasi 100%, teridentifikasi target **terpenuhi** 100%.

Tabel 2.2 Perhitungan Indikator Kinerja Persentase Keluhan Pengguna
Layanan Yang Ditindaklanjuti

Komponen Perhitungan	Bobot
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	40%
persentase realiasi anggaran	30%
Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25%
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	5%

Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dari target 80% terealisasi 100%, tingkat capaian kinerja 125%.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan, dari target 0,18% terealisasi 0,04%, target tercapai dengan menurunnya persentase temuan laporan keuangan pada tahun 2024.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah dari target 20% terealisasi 0%, target tercapai dengan menurunnya persentase temuan audit barang milik daerah tahun 2024.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan, dari target 40% terealisasi 33%, tingkat capaian kinerja 82,50%.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi, dari target 30% terealisasi 51,35%, tingkat capaian kinerja 171,17% capaian kinerja melebihi target.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi, dari target 100% terealisasi 100%, capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik, dari target kinerja 60% terealisasi 50,73%, tingkat capaian kinerja 84,55% capaian kinerja belum mencapai target.

B. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan riset dan inovasi di Provinsi Kalimantan Timur. Tercapainya kinerja program tersebut diukur dengan tolok ukur sebagai berikut :

1. Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran, diukur melalui jumlah hasil riset yang masuk dalam dokumen Renja PD yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran, dari target 2 (dua) riset terealisasi 2 (dua) riset, tingkat capaian kinerja 100%. Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dengan indikator kinerja Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota, dari target kinerja 2% terealisasi 2%, tingkat capaian kinerja 100%.
 - b) Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan dengan indikator kinerja Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota, dari target kinerja 2% terealisasi 2%, tingkat capaian kinerja 100%.
 - c) Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota, dari target kinerja 2% terealisasi 2%, tingkat capaian kinerja 100%. Data-data capaian kinerja program dan kegiatan riset dan inovasi tersebut :

Hasil Riset yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Renja dan DPA PD :

- Dokumen RENJA dan DPA Dinas Pariwisata Prov. Kaltim Tahun 2024, Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir pada laporan ini.
 - Dokumen Renja dan DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Prov. Kaltim Tahun 2024, Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 sebagaimana terlampir pada laporan ini.
2. Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran, diukur melalui jumlah hasil inovasi yang masuk dalam dokumen Renja PD yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran, dari target 2 (dua) inovasi terealisasi 2 (dua) inovasi, tingkat capaian kinerja 100%. Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran didukung oleh kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi dengan indikator kinerja “Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota”, dari target kinerja 11% terealisasi 9%, tingkat capaian kinerja 81,82%.

Hasil Inovasi yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Renja dan DPA PD:

- a) Dokumen Renja dan DPA Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 pada sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
- b) Dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024 Lomba Kreasi Inovasi (KRESNOVA) pada sub kegiatan Uji Coba Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya di dalam dokumen Renstra 2024-2026 dan Renja Tahun 2024. Adapun capaian kinerja utama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Balitbangda Prov. Kaltim

No.	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Prangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat Indikator :										
1.1	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah			2	5	10	2		5	10	100% (2024)
1.2	Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah			2	5	10	2		5	10	100% (2024)
2.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Balitbangda Indikator :										
2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda			75 (BB)	77,50 (BB)	78,10 (BB)	75,25 (BB)		77,50 (BB)	78,10 (BB)	100,33% (2024)
2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda			83	84	85	86		90	90	103,61% (2024)

Sumber Data : Realisasi Indikator Kinerja Utama Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024

Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Pasal 68, BRIDA menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah

yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023, disebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian menjadi latarbelakang atau pedoman Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur dalam mengukur keberhasilan kinerja organisasi melalui pemanfaatan dan penerapan hasil **“Riset” dan “Inovasi”** yang menjadi Indikator Kinerja Utama Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

1. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat, dengan indikator kinerja :

- a) Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah, target tercapai 100% (target 2 riset terpenuhi 100%).
- b) Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah, target tercapai 100% (target 2 inovasi terpenuhi 100%).

Hasil riset dan inovasi yang diterapkan tersebut meliputi :

- a) Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dengan Hasil Rekomendasi riset yaitu : Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan membangun creative hub di Gedung ex temindung pada tahun 2024 untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.
- b) Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 Tahun 2023, dengan hasil rekomendasi hasil riset yaitu : Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan melaksanakan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada tahun 2024 untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.

- c) Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diinisiasi oleh Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada perencanaan dan penganggaran tahun 2024, sebagai data dukung dokumen Renja dan DPA Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- d) Kegiatan Kreasi Inovasi (KRESNOVA) Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024. Kegiatan Kreasi Inovasi yang dilaksanakan oleh Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 diinisiasi oleh Bappedalitbang Kota Balikpapan menjadi kegiatan KRESNOVA pada perencanaan dan penganggaran tahun 2024, sebagai data dukung dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024. Meskipun teridentifikasi dalam kategori "Sangat Tinggi" masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, evaluasi, dan perbaikan kinerja kedepan mengingat tantangan untuk peningkatan kualitas riset dan inovasi yang efektif guna mendukung prioritas nasional dan provinsi.

Tercapainya target kinerja sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Indikator sasaran strategis berfungsi untuk mengukur seberapa besar peluang jumlah hasil riset dan inovasi yang akan diimplementasikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat), untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim. Terdapat beberapa hal atau faktor yang mendorong keberhasilan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim dalam mengupayakan tercapainya target kinerja sasaran strategis, beberapa diantaranya:

I. Faktor Eksternal Pendorong Penerapan Hasil Riset dan Inovasi :

- a) Kebijakan yang mengatur tentang riset dan inovasi, antara lain :
- Peraturan
- Presiden RI nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja PD.

- c) Kerjasama Riset dan Inovasi multipihak melalui kolaborasi dan sinkronisasi riset dan inovasi secara nasional dan internasional.
- d) Adanya fasilitasi dan penjangkaran inovasi.

II. Faktor Internal Pendorong Penerapan Hasil Riset dan Inovasi :

- a) IKU dari sasaran strategis yang menjadi komitmen pimpinan untuk meningkatkan Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat
- b) Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang berbasis Teknologi Informasi aplikasi IRIS (Innovation and Research Information System).
- c) Jurnal Riset Pembangunan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim sebagai wadah bagi periset di lingkungan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim dan BRIN untuk menyampaikan karya tulis ilmiah hasil riset.
- d) Adanya sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil riset dan inovasi
- e) Kepatuhan ASN terhadap kebijakan yang berlaku.

III. Faktor Eksternal Penghambat Penerapan Hasil Riset dan Inovasi :

- a) Belum optimalnya hasil riset dan inovasi yang diterapkan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.
- b) Belum ada regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- c) Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pemangku kepentingan dari pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- d) Keterbatasan jumlah periset dan bidang kepakaran di Provinsi Kalimantan Timur.

IV. Faktor Internal Penghambat Penerapan Hasil Riset dan Inovasi :

Belum optimalnya pengawalan pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim. Masalah terbesar yang hampir dialami seluruh lembaga riset adalah belum dimanfaatkannya hasil riset dan inovasi oleh pemangku kepentingan, disebabkan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan tidak bersifat aplikatif sehingga tidak dapat diterapkan ke masyarakat dan pembangunan daerah.

- Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghindari penurunan kinerja sasaran strategis :

a) Perencanaan Kinerja

Menyusun dokumen perencanaan kinerja berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan serta melakukan revidi secara berkala dan berjenjang pada aplikasi E-SAKIP.

b) Pengukuran Kinerja

- Menyusun kebijakan internal mengadopsi Per Budaya Kerja No 30 Thn 2024 (yang memuat diantaranya kriteria atas pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment).
- Optimalisasi pemanfaatan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward and Punishment (penghargaan bagi ASN berkinerja terbaik dan hukuman atas pelanggaran disiplin).
- Membuat laporan hasil monev implementasi Rencana Aksi secara berkala dilengkapi dengan uraian faktor pendorong, permasalahan dan rekomendasi, tindak lanjut secara berkala (per triwulan/per bulan).

c) Pelaporan Kinerja

- Optimalisasi pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja (LKJIP) agar
- menjadi perhatian utama pimpinan dalam mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi melalui revidi LKJIP per triwulan.
- Menyajikan informasi dalam laporan kinerja (LKJIP) yang telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
- Capaian Kinerja
- Meningkatkan kreatifitas dan berinovasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRIDA Kaltim 2024.

e) Lain-lain

- Penguatan basis data dan portal informasi usulan riset dan pengembangan inovasi yang terintegrasi dalam kebijakan strategis Pembangunan Daerah.
- Penguatan mekanisme koordinasi dan kolaborasi berbasis kewenangan antar tingkat pemerintah, antar sector dan pemangku kepentingan terkait aspek strategis riset dan pengembangan inovasi yang berdampak, berkelanjutan dan berdaya saing.
- Penguatan SDM (Periset dan Analis Kebijakan) dan fungsi kelembagaan pengampu urusan dan mitra program, penguatan sarana prasarana (laboratorium, workshop, data center), akses kemitraan

pembiayaan dengan dunia usaha/hilirisasi serta akses kerjasama dalam riset dan pengembangan inovasi.

- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset pada aplikasi IRIS
- Optimalisasi pemetaan hasil inovasi serta inventarisasi usulan inovasi melalui aplikasi IRIS
- Optimalisasi pemanfaatan hasil inovasi melalui kolaborasi inovasi dengan para stakeholder ABGC (Academics,Business Goverment,Community)

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Balitbangda”, merupakan amanat dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0007.2.2/5373/Bapp- II,tanggal 3 April 2023 perihal penambahan tujuan dan sasaran Renstra PD 2024-2026. Dimana pada lampiran surat tersebut disebutkan bahwa Perangkat Daerah yang core business tidak memberikan pelayanan publik secara langsung agar mempedomani cascading kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Balitbangda diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

a) Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda, dari target nilai SAKIP 75 (BB) tercapai 75,25 (BB) dengan tingkat capaian 100,33%. Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024 terlaksana dengan perolehan nilai 75,25 (BB), nilai tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Tahun 2023 dengan nilai 70 (B). Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja serta menghindari penurunan kinerja sasaran strategis:

- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi pada aplikasi IRIS.
- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi pada aplikasi E-SAKIP secara berkala.
- Menciptakan budaya kerja yang dapat mendukung meningkatnya kinerja ASN Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim.
- Komitmen pimpinan dalam penentuan kebijakan pelaksanaan program dan Kegiatan.
- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim yang terampil dan inovatif melalui pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis berdasarkan tugas dan fungsi ASN BRIDA Prov. Kaltim.

- b) Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda, dari target nilai SKM yang ditetapkan senilai 83 telah mencapai target 86 sehingga tingkat capaian kinerja $\geq 100\%$ (103,61%).

Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda Tahun 2024 berkinerja $\geq 100\%$ didukung oleh optimalisasi pelayanan publik baik dalam rangkaian kegiatan riset dan inovasi ataupun kesekretariatan Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim telah memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat. Meskipun capaian kinerja masuk kategori sangat tinggi, masih dibutuhkan strategi peningkatan pelayanan Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim untuk melihat seberapa puas publik menilai pelayanan yang telah dilakukan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja serta menghindari penurunan kinerja sasaran strategis:

Upaya Peningkatan Pelayanan internal :

- Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
- Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat'
- Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

- Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
- Menunjuk atau menugaskan tim pelaksana kegiatan yang secara independen dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat IKM).
- Secara berkala pimpinan unit menugaskan tim pelaksana yang ditunjuk tersebut melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim.

Upaya Peningkatan pelayanan eksternal:

- Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan IKM unit pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya wajib dipublikasikan kepada masyarakat berbasis informasi teknologi.
- Dalam rangka pelaksanaan penyusunan IKM unit pelayanan, melaporkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat IKM secara berkala kepada Perangkat Daerah pengampu urusan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pemerintah Daerah.

Untuk periode tahun 2025 merupakan masa transisi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029, sehingga capaian kinerja akan mempedomani Renstra Balitbangda/BRIDA provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu Strategis Balitbangda Provinsi Kaltim

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 43 tahun 2023, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur telah berubah nomenklaturnya menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan nomenklatur tersebut juga telah mengubah lingkup tugas dan fungsinya, semula hanya di lingkup penelitian dan pengembangan (Litbang), menjadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Invensi, Inovasi, dan Evaluasi Kebijakan (Litbangjirap-Inovek).

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)/ Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub bagian Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)/ Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Membantu Gubernur Melaksanakan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan.
2. Melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Sebagai Landasan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman pada Nilai Pancasila. Sedangkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)/Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur adalah :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Riset dan Inovasi Daerah Sesuai Dengan Rencana Strategis yang Ditetapkan Pemerintah Daerah.
 2. Perumusan dan Penetapan Bahan/Materi dan Penyusunan Kebijakan Strategis dan Teknis Penelitian.
 3. Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
 4. Perumusan Program dan Kegiatan Di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
 5. Pelaksanaan Kebijakan, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi Serta Evaluasi Kebijakan Di Daerah yang Memperkuat Fungsi dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Sebagai Landasan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman Pada Nilai Pancasila.
 6. Penyusunan Kelembagaan, Perencanaan, dan Sumber Program, Daya Anggaran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah yang Berpedoman Pada Nilai Pancasila.

7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Riset dan Inovasi, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah.
8. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi Di Bidang Riset Dan Inovasi, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah.
9. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah.
10. Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah.
11. Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/Organisasi Penelitian Lainnya Di Daerah.
12. Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah.
13. Penyelenggaraan Pengkoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Perbantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
14. Melaksanakan Tugas Dukungan Teknis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan tugas Dekonsentrasi dan Perbantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
15. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
16. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan.
17. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
18. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Gubernur yang Berkaitan Dengan Tugasnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2026, dapat dijelaskan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Balitbangda	78,10	24,364,569,500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan penyelenggaraan Riset dan Inovasi	44,58%	24,364,569,500
			Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	85						
5.05.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90 %	499,268,080	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90 %	499,268,080
5.05.01.1.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	263,800,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	263,800,000
5.05.01.1.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	44,547,020	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	44,547,020
5.05.01.1.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,067,020	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,067,020

5.05.01.1.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,107,020	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,107,020
5.05.01.1.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,107,020	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,107,020
5.05.01.1.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	184,720,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	184,720,000
5.05.01.1.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,920,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,920,000
5.05.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0 %	17,069,009,907	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0 %	17,069,009,907
5.05.01.1.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	16,677,967,099	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	16,677,967,099
5.05.01.1.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	322,680,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	322,680,000
5.05.01.1.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	16,800,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	16,800,000

5.05.01.1.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	16,800,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	16,800,000
5.05.01.1.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	720,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	720,000
5.05.01.1.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	30 Laporan	34,042,808	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	30 Laporan	34,042,808
5.05.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah	10 %	44,165,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah	10 %	44,165,000
5.05.01.1.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480,000
5.05.01.1.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480,000
5.05.01.1.0 3.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000
5.05.01.1.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	42,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	42,000,000
5.05.01.1.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,200,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,200,000

5.05.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	70 %	217,440,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	70 %	217,440,000
5.05.01.1.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72,720,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72,720,000
5.05.01.1.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6,720,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6,720,000
5.05.01.1.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	90,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	90,000,000
5.05.01.1.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	48,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	48,000,000
5.05.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	95 %	2,561,784,413	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	95 %	2,561,784,413
5.05.01.1.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41,528,741	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41,528,741
5.05.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,037,796	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,037,796
5.05.01.1.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,122,822	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,122,822
5.05.01.1.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	68,089,456	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	68,089,456

5.05.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59,941,598	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59,941,598
5.05.01.1.0 6.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	48,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	48,000,000
5.05.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,175,264,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,175,264,000
5.05.01.1.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	49,800,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	49,800,000
5.05.01.1.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	17,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	17,000,000
5.05.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	100 %	753,563,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	100 %	753,563,000
XX.01.1.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100,000
5.05.01.1.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	718,732,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	718,732,000
5.05.01.1.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	34,431,000	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	34,431,000

5.05.01.1.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	100,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	100,000
5.05.01.1.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000
5.05.01.1.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000
5.05.01.1.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000
5.05.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	2,602,511,100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	2,602,511,100
5.05.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000
5.05.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	543,777,100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	543,777,100
5.05.01.1.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	368,670,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	368,670,000
5.05.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	1,685,064,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	1,685,064,000
5.05.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	80 %	616,828,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	80 %	616,828,000

5.05.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	81,120,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	81,120,000
5.05.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	147,260,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	147,260,000
5.05.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	51,084,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	51,084,000
5.05.01.1.0 9.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	44,400,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	44,400,000
5.05.01.1.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	227,964,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	227,964,000
XX.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9,750,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9,750,000
5.05.01.1.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	65,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	65,000,000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	18%	11,144,330,500	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/ naskah akademis rancangan perda/pergub	75,76%	11,144,330,500

			Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	18%				Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI)	75,76%	
								Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategrs/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah	75,76%	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	2,249,830,500	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	2,249,830,500
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	314,300,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	314,300,000
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	762,642,500	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	762,642,500
5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	100,000

5.05.02.1.0 1.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	264,300,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	264,300,000
5.05.02.1.0 1.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	264,300,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	264,300,000
5.05.02.1.0 1.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	100,000
5.05.02.1.0 1.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	100,000
5.05.02.1.0 1.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	100,000
5.05.02.1.0 1.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1 Laporan	100,000

5.05.02.1.0 1.0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Laporan	100,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Laporan	100,000
5.05.02.1.0 1.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	264,300,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	264,300,000
5.05.02.1.0 1.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	114,888,000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	114,888,000
5.05.02.1.0 1.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	264,300,000	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	264,300,000
5.05.02.1.0 1.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	100,000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	100,000
5.05.02.1.0 1.0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100,000	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100,000
5.05.02.1.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	1,574,300,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	1,574,300,000

5.05.02.1.0 2.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	216,300,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	216,300,000
5.05.02.1.0 2.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	264,300,000	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	264,300,000
5.05.02.1.0 2.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	264,300,000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	264,300,000
5.05.02.1.0 2.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	100,000	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	100,000
5.05.02.1.0 2.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100,000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100,000
5.05.02.1.0 2.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	264,300,000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	264,300,000
5.05.02.1.0 2.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	100,000	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	100,000
5.05.02.1.0 2.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	100,000	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	100,000

5.05.02.1.0 2.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	264,300,000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	264,300,000
5.05.02.1.0 2.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	300,300,000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	300,300,000
5.05.02.1.0 2.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1 Dokumen	100,000	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1 Dokumen	100,000
5.05.02.1.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	3,021,400,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5 %	3,021,400,000
5.05.02.1.0 3.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	45,000,000	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	45,000,000
5.05.02.1.0 3.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	325,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	325,000,000

5.05.02.1.0 3.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	271,400,000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	271,400,000
5.05.02.1.0 3.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	325,000,000	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	325,000,000
5.05.02.1.0 3.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	260,000,000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	260,000,000
5.05.02.1.0 3.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	250,000,000
5.05.02.1.0 3.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	250,000,000	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	250,000,000

5.05.02.1.0 3.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	45,000,000	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	45,000,000
5.05.02.1.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	12 %	4,298,800,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	12 %	4,298,800,000
5.05.02.1.0 4.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1,200,000,000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1,200,000,000
5.05.02.1.0 4.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	1,048,800,000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	1,048,800,000
5.05.02.1.0 4.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1,450,000,000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1,450,000,000
5.05.02.1.0 4.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	400,000,000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	400,000,000
5.05.02.1.0 4.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	200,000,000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	200,000,000
35,518,750,000						35,518,750,000				

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim memiliki 3 (tiga) nomenklatur urusan program yakni Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Riset dan Inovasi Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Namun dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026 Program Riset dan Inovasi Daerah belum dapat diakomodir karena terbatasnya anggaran. Indikator dan target kinerja program penunjang dan urusan pemerintahan daerah dan program penelitian dan pengembangan daerah pada rancangan awal renja 2026 merujuk pada Renstra 2024-2026, sedangkan indikator dan target kinerja pada analisis kebutuhan merujuk pada Renstra 2025-2029.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Innovation and Research Information System (IRIS) merupakan pusat layanan riset dan inovasi terpadu yang dikembangkan dan dikelola oleh BRIDA KALTIM. IRIS BRIDA KALTIM bertujuan untuk mendukung terciptanya ekosistem riset dan inovasi, baik dilingkup Daerah Kalimantan Timur, Nasional maupun Global. Beberapa fitur yang dimiliki IRIS adalah penjangkauan inovasi dan riset untuk mengumpulkan hasil-hasil inovasi & riset, usulan kebutuhan riset untuk membantu instansi atau kelompok yang membutuhkan riset, pengajuan pelayanan KI (Kekayaan Intelektual) untuk membantu pendaftaran kekayaan intelektual bagi instansi atau pribadi.

Usulan-usulan riset dan inovasi tersebut kemudian menjadi bahan atau tema-tema riset dan inovasi dalam program dan kegiatan riset dan inovasi yang kemudian akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.5
Usulan Riset-Riset dari Para Pemangku Kepentingan
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
2022				
1	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda	Lembaga	Stunting adalah kasus yang saat ini menjadi perhatian dunia khususnya di Indonesia. Kekurangan asupan gizi jangka panjang ditambah kasus penyakit yang sering terjadi pada masyarakat menyebabkan kasus stunting menjadi meningkat . Presentasi kasus stunting di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 28,09 persen dan tahun 2021 sebesar 22,8 persen. Sementara di Kaltim terdapat 4 Kabupaten dan Kota yang memiliki angka stunting paling rendah presentase rerata Provinsi yakni Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda. Sedangkan untuk 6 Kabupaten/kota lainnya Kutai Timur, PPU, Kukar, Bontang, Berau dan Paser, yang memiliki persentase stuntingnya masih berada di atas rerata Provinsi [3]. Hal ini terkait dengan dampak jangka panjang yang signifikan di masa dewasa, berupa penurunan perkembangan kognitif dan fisik serta risiko penyakit metabolik yang lebih tinggi. Berdasarkan data survei kesehatan nasional yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan Indonesia, kasus stunting terjadi sekitar 37% dari jumlah penduduk Indonesi lebih tinggi dari Malaysia dengan jumlah kasus 20,7%. Kondisi ini memerlukan pemecahan masalah agar kasus stunting tidak menjadi berkembang dan semakin meningkat.	Samarinda, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
2	Dr. Enos Paselle., M.A.P	Perorangan	"Respon dan adaptasi masyarakat terhadap tekanan dan peluang yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara dan perkebunan sawit korporasi di Kalimantan Timur" Dalam tekanan manusia selalu mencari jalan keluar (respon, adaptasi), termasuk dalam menghadapi tekanan (dan peluang) yang ditimbulkan oleh korporasi tambang batubara dan perkebunan sawit. Jalan keluar atau respon ekonomi dan sosio-kultural apa yang diambil oleh warga? Identifikasi model-model respon/adaptasi yang ditemukan oleh riset dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis budaya dan sumberdaya lokal, yang menunjang ekonomi hijau dan berkelanjutan.	Wilayah pertambangan batubara dan perkebunan sawit korporasi di Kalimantan Timur
3	Prof. Dr. H. Abd. Rachim AF., S.E., M.Si. dan Tim Peneliti	Perorangan	"Analisa Potensi Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Timur" Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang menjadi hinterland wilayah Badan Otorita IKN Nusantara memerlukan analisa potensi program ketahanan pangan pada seluruh wilayah Kabupaten / Kota yang memerlukan distribusi pasokan pangan secara berkelanjutan. Upaya optimalisasi perwujudan ketahanan pangan tetap harus memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai upaya implementasi pelestarian kebudayaan nasional dengan jaminan kualitas yang terjaga sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), serta terjamin secara kuantitas terutama keamanan ketersediaan pangan pada musim-musim tertentu, baik karena momen penting seperti keterpenuhan saat hari-hari besar nasional, dan saat terjadi kondisi iklim yang tidak stabil. Potensi ketahanan pangan sangat di pengaruhi berbagai faktor produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, modal, dan kelembagaan, maka di perlukan analisa potensi Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal	Wilayah Kalimantan Timur

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
2023				
1	Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman	Lembaga	Riset kali ini merupakan bagian dari bidang prioritas berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional yakni Fokus Riset Kesehatan dan Obat dengan tema Kemandirian Bahan baku obat dengan dengan topik pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal. Kebaharuan dan terobosan teknologi yang akan dicapai dalam dalam kegiatan riset kali ini adalah diperolehnya data informasi Tumbuhan Endemik Kalimantan timur, Koleksi/Database Simplisia, ekstrak, fraksi dan Isolat /Simplicia, Extract, Isolat From Natural Products Borneo (SEINAPRO), Data aktifitas sebagai Bahan Baku Farmasi Baik sebagai Active Pharmaceutical Ingredients (APIs), Exipient, Kosmetik, dan Nutrasetikal, data toksisitas, dan Profil Struktur Kimia hasil isolasi.	Laboratorium Farmaka Tropis fakultas Farmasi Universitas Mulawarman
2	Kelompok Riset Waste to Energy-PRKKE- BRIN	Lembaga	Penanganan sampah adalah hal yang belum selesai di Indonesia dikarenakan penanganan sampah yang masih rendah berkisar 50% dan yang sudah dilakukan pengelolaan kurang dari itu. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang meningkat hampir 3 kali lipat dari tahun 1950 an tidak sebanding dengan peningkatan volume sampah yang mencapai hingga 200 kali lipat. Hal ini menunjukkan pengelolaan sampah adalah hal mutlak yang segera dilakukan. Dengan pengelolaan menggunakan manajemen yang tepat permasalahan sampah yakin bisa diatasi dalam jangka beberapa tahun kedepan khususnya di provinsi Kalimantan Timur.	KST-BJ Habibie, Gedung 480, Serpong-Banten (https://maps.app.goo.gl/MicKgnqjjomGDJKx7)
3	Sugeng	Perorangan	Organisasi Perangkat Daerah tidak bisa menentukan persentase realisasi fisik dari suatu kegiatan, sehingga kolom persentase realisasi fisik pada pelaporan diisi dengan angka persen yang tidak ada dasar pengisian. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rumus untuk	Samarinda

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
			mendapatkan persen harus ada Angka Pembilang dibagi Angka Penyebut dikali seratus.	
4	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur	Lembaga	Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur sangat berpengaruh di segala aspek. Posisi Kalimantan di kawasan timur tengah Indonesia diharapkan menjadi Pusat Gravitasi bagi pembangunan dan perekonomian yang sustainable dengan harapan pemanfaatan potensi dapat dilakukan secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, Kalimantan khususnya Kalimantan Timur harus siap dalam segala hal menerima keberadaan IKN. Kondisi ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Timur karena banyaknya pendatang dan pesaing. Hal ini menjadi tugas dan tuntutan bagi peneliti dan masyarakat setempat untuk tetap berkarya dan berkreaitivitas agar tidak tersingkir. Beberapa Isu/ permasalahan yang diketahui: 1. Penanggulangan banjir masih perlu ditingkatkan 2. Penanggulangan macet lalu lintas 3. Pemanfaatan IT yang kurang 4. Perlunya peningkatan fasilitas pengembangan karya masyarakat 5. Pemanfaatan sumber daya manusia yang kurang maksimal 6. Peluang kerja sama dalam penelitian dengan Peneliti dari Universitas Kaltim yang masih kurang 7. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan pasca tambang yang kurang maksimal 8. Pengetahuan yang minim dalam mengolah sampah dan limbah khususnya limbah rumah tangga 9. Persiapan masyarakat yang masih minim dalam menghadapi IKN Usulan kolaborasi riset ini diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional khususnya di Kalimantan Timur dalam menghadapi isu-isu atau permasalahan yang ada khususnya dalam menghadapi IKN.	Lokasi yang dipilih dalam Riset ini mencakup daerah Kota Samarinda, daerah IKN (sepaku dan sekitarnya) dan beberapa daerah di Kalimantan Timur lainnya seperti Berau, Tenggarong, Kutai Lama, dan lainnya)

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
5	Bapelitbang Berau	Lembaga	Melihat besarnya potensi sumberdaya alam berupa lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Kabupaten Berau khususnya Desa Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur, sehingga sangat penting dilaksanakan kegiatan inventarisasi data Pertanian, Perkebunan dan Pangan Kabupaten Berau untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang tersebut	Kampung Melati Jaya Kec. Gunung Tabur
6	Bappedalitbang Kota samarinda	Lembaga	1. Potensi Sumber Daya Alam Kota Samarinda 2. Mitigasi Dampak Geologis kota Samarinda (peta rawan bencana) kota Samarinda.	Kota Samarinda.
7	Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN dan BRIDA Kaltim	Lembaga	Trend penjualan bioproduk herbal meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan pemasaran secara online dengan jangkauan yang hingga mencapai antar pulau. Proses pengiriman produk tersebut yang paling lama dilalui saat melalui jalan darat dengan mobil, khususnya mobil kargo/box, dengan suhu atap mobil box dapat mencapai 1000C dan 900C pada bagian container mobil kargo/box. Suhu panas ini diprediksi dapat mempengaruhi kualitas bioproduk herbal yang bersifat termolabil. Sebagai contoh herbal termolabil diantaranya adalah oleoresin, jenis akar dan jamur, teh herbal, sediaan cair seperti sirup, kelompok minyak dan lemak, seperti misalnya lemak tengkawang. Seringkali secara fisik tidak banyak terjadi perubahan, akan tetapi suhu panas dan waktu pengiriman bioherbal dalam kemasan diprediksi akan mempengaruhi kualitas kimia, atau bahkan efikasi dari produk bioherbal dimaksud.	Samarinda, Balikpapan

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
8	Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, BRIN dan BRIDA Kaltim	Lembaga	Perkembangan transportasi darat yang pesat menyebabkan meningkatnya jumlah mobil, sebagai salah satu alat transportasi darat yang vital. Hal ini membuat tuntutan akan kinerja mobil saat dioperasikan menjadi sangatlah penting. Kinerja mobil dimaksud, salah satunya dipengaruhi oleh sistem radiator sebagai pendingin mobil. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam sistem radiator mobil, diantaranya : cairan pendingin radiator harus mudah mengalir dalam sistem pendingin, memiliki titik didih tinggi, lambat panas dan menghambat proses korosi. Lebih lanjut, Oleoresin keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) merupakan salah satu jenis pohon yang menyusun ekosistem hutan Dipterokarpa dan tersedia dalam jumlah besar sebagai kekayaan alam bumi Kalimantan. Peneliti terbaru menyatakan bahwa Oleoresin keruing merupakan salah satu inhibitor korosi pada logam. Pemanfaatannya dalam skala luas masih perlu dikembangkan dalam rangka mencari alternatif bahan alam yang lebih ramah lingkungan.	Samarinda
9	Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN dan BRIDA Kaltim	Lembaga	Perkembangan transportasi darat yang pesat menyebabkan meningkatnya jumlah mobil, sebagai salah satu alat transportasi darat yang vital. Hal ini membuat tuntutan akan kinerja mobil saat dioperasikan menjadi sangatlah penting. Kinerja mobil dimaksud, salah satunya dipengaruhi oleh sistem radiator sebagai pendingin mobil. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam sistem radiator mobil, diantaranya : cairan pendingin radiator harus mudah mengalir dalam sistem pendingin, memiliki titik didih tinggi, lambat panas dan menghambat proses korosi. Lebih lanjut, Oleoresin keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) merupakan salah satu jenis pohon yang menyusun ekosistem hutan Dipterokarpa dan tersedia dalam jumlah	Samarinda

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
			besar sebagai kekayaan alam bumi Kalimantan. Peneliti terbaru menyatakan bahwa Oleoresin keruing merupakan salah satu inhibitor korosi pada logam. Pemanfaatannya dalam skala luas masih perlu dikembangkan dalam rangka mencari alternatif bahan alam yang lebih ramah lingkungan.	
10	Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Lembaga	Pada Wilayah UPTD KPHL Balikpapan Unit XXX Sungai Wain - Manggar terdapat izin pemanfaatan hutan berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. SK.129/Menhut-II/2011, ditetapkan areal kerja HKm seluas 1.400 ha. Setelah penyesuaian batas berdasarkan SK.718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 maka luasnya menjadi 1.417 ha. Areal ini digunakan sebagai dasar pemberian IUPHKm oleh Walikota Balikpapan kepada kelompok masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan HL Sungai Wain Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, dengan ketentuan maksimal 15 ha per Kepala Keluarga (KK). Pemberian IUPHKm diterbitkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.	KPHL Balikpapan
11	Eddy Mangopo Angi	Lembaga	Bahwa pada dasarnya kawasan HLSM merupakan areal transmigrasi tahun 1970–1980 yang telah berkembang sebelum ditetapkannya HLSM tahun 1996, dimana merupakan wilayah pemukiman sub-urban yang telah berkembang menjadi sentra pertanian bagi kota Balikpapan. Disisi lain sebagian warga telah menetap dan memiliki sertifikat penguasaan/pemilikan tanah serta investasi lainnya. Hal yang terpenting adalah wilayah HLSM ini menjadi sumber air utama Kota Balikpapan. Adanya beda kepentingan di HLSM ini menimbulkan konflik secara tidak langsung terkait kepentingan akibat distribusi	Lokasi kegiatan di wilayah HLSM dan DAS Manggar secara umum dalam wilayah kerja UPTD KPHL Balikpapan Unit XXX Sungai Wain–Manggar Provinsi Kaltim

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
			hak/kewenangan yang berbeda. Masyarakat setempat dalam hal ini warga sekitar HLSM telah menguasai tanah/lahan garapan, Sementara Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini PDAM Balikpapan berkepentingan dalam pengelolaan kawasan Waduk Manggar dan pihak Kementerian Kehutanan dan jajarannya di bawahnya melakukan pemanfaatan tegakan dan fungsi HL. Permasalahan di wilayah HLSM ditambah lagi dengan pembukaan jalan bebas hambatan (Tol) yang membelah kawasan HLSM dari Kota Balikpapan menuju Samarinda dan ditetapkannya wilayah Penajam Paser Utara (PPU) – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) oleh pemerintah pusat yang sebagian wilayahnya menjadi Ibukota Nusantara (IKN) bahkan sebagian wilayah DAS HLSM masuk dalam wilayah IKN.	
12	Eddy Mangopo Angi	Perorangan	Paska dikeluarkannya izin dengan jumlah 123 izin tersebut di atas, banyak masalah yang muncul terkait dengan keberlanjutan program untuk jangka 35 tahun ke depan. Dari ke-5 skema izin yang dikeluarkan masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri, mulai dari masalah tingkat kemajuan kelembagaan, penyusunan Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), pendampingan/penyuluh, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), pengembangan potensi lokal, akses ke lokasi Hutsos, kegiatan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), ketersediaan dana sampai dengan keterlibatan pihak lain paska izin dikeluarkan. Hal-hal ini yang menjadi catatan tersendiri bagi kajian ini dalam mengevaluasi perkembangan kemajuan pelaksanaan Hutsos di Kaltim.	Di 6 kabupaten/kota yaitu: 1). Kabupaten Berau; 2). Kabupaten Kutai Barat; 3). Kabupaten Kutai Kartanegara; 4). Kabupaten Kutai Timur; 5). Kabupaten Paser; 6). Kota Balikpapan

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
13	DR. IR. HABIR. MT	Perorangan	Manajemen Banjir Pada DAS Sungai Karanga Asam Besar Kota Samarinda	DAS Sungai Karang Asam Besar Kota Samarinda
14	ardiyanto wahyu nugroho	Perorangan	Pengembangan destinasi ekowisata di kawasan IKN dapat dilakukan dengan cara mempromosikan makanan lokal sebagai daya tarik utama atau pelengkap. Hal tersebut dapat meningkatkan kunjungan maupun potensi pengunjung untuk datang kembali. Mayoritas pelaku wisata menganggap daya tarik wisata terkait makanan lokal (gastronomy) merupakan elemen penting yang menentukan identitas suatu destinasi wisata. Kawasan sekitar IKN banyak dihuni oleh suku Dayak Kalimantan yang memanfaatkan tumbuhan hutan secara tradisional. Suku Dayak itu sendiri sangat beragam karena suku tersebut terdiri dari sejumlah sub-suku yang tersebar berbagai daerah di Pulau Kalimantan. Setiap sub-suku dayak mempunyai informasi mengenai kuliner lokal yang dapat dipromosikan dalam ekowisata. Melalui studi etnobotani, penggunaan tumbuhan hutan untuk berbagai keperluan dapat diungkap.	Kabupaten Kukar dan PPU
2024				
1	Julian Witjakono	Lembaga	Pertumbuhan populasi penduduk di IKN, Konversi lahan, kebutuhan dan ketersediaan lahan untuk intensifikasi peningkatan produksi padi, konversi lahan sawah ke non sawah, faktor eksternal dalam kelas kesesuaian lahan.	Provinsi Kalimantan Timur
2	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Lembaga	Pertumbuhan populasi penduduk di Ibu Kota Negara akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya Pusat pemerintahan dan pusat bisnis di IKN, oleh sebab itu untuk memenuhi konsumsi beras di IKN maka perlu dilakukan riset untuk memproyeksikan ketersediaan dan kebutuhan beras berdasarkan beberapa parameter yang mempengaruhi produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten penghasil beras di Provinsi Kalimantan Timur

NO	NAMA PENGUSUL	KATEGORI	ISU PERMASALAHAN	LOKASI
3	Kelompok Usaha Penangkaran Anggrek Spesies (KUPAS) Kaltim "Zwageri Orchid Garden"	Lembaga	Ancaman kepunahan jenis-jenis anggrek spesies Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah pusat persebaran anggrek dunia	Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang
4	Dr. Nuril Farizah, S.Pi, M.Si	Lembaga	Kepiting Bakau merupakan komoditas penting perikanan di Indonesia sejak tahun 1980-an. Kepiting menjadi primadona di provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini. Pada tahun 2021, produksi kepiting bakau Kalimantan Timur sebesar 1800 ton, sedangkan untuk ekspor kepiting baru mencapai diangka 895 ton pada tahun 2022 (Januari – Agustus), yang sebagian besar permintaan pasar dipenuhi dari hasil tangkapan Kecamatan Anggana serta sekitar perairan Delta Mahakam. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan over-fishing adalah melakukan inventarisasi keragaman genetik pada kepiting bakau. Kegiatan inventarisasi keragaman genetik ini sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya kepiting bakau di wilayah perairan Indonesia serta keberlanjutan populasi spesies ini. Kepiting bakau memiliki siklus hidup yang kompleks dimulai dengan fase larva, benthik/zooplankton, crablet dan dewasa yang sangat tergantung dengan kondisi lingkungannya untuk bertahan hidup, proses ini sudah terjadi sejak lama (masa evolusi), yaitu sejak periode miosen, pleistosen dan holosen yang berlangsung dari puluhan jutaan sampai ribuan tahun yang. Secara fisiologis kepiting bakau mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu dan salinitas yang biasanya terjadi di ekosistem mangrove.	Lokasi di daerah estuari perairan Mahakam, Kalimantan Timur (Anggana, Muara Tambora, Muara Pantuan, Tani Baru, Tanjung Pemenang)

Sumber Data : Aplikasi Inovation Innovation and Research Information System (IRIS).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat 3 (tiga) strategis utama pembangunan atau Trisula Pembangunan Daerah yang dirumuskan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas serta kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang daerah.

Penahapan pembangunan merupakan salah satu bagian dari strategi yang menggambarkan arah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun penahapan pembangunan RPJMD secara indikatif direpresentasikan melalui tema pembangunan tahunan. Penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 terbagi menjadi 5 (lima) tahap pembangunan, yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 1 (Tahun 2026) penahapan pembangunan daerah tahap 1 adalah “Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, serta ekonomi produktif dan inklusif sebagai fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.

Untuk mendukung terlaksananya Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim turut berperan serta dengan melaksanakan riset/kajian serta inovasi sesuai dengan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu membantu Gubernur melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang

kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Adapun telaahan kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Telaahan kebijakan dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD 2025- 2045, RPJMD 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026

ASTA CITA	RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN RUDI-SENO	RKPD PROVINSI KALTIM 2026
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);					
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Prioritas Nasional 2 (Tranformasi Ekonomi, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia dan ketahanan sosial budaya dan ekologi)	P1 : Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan air			
	Prioritas Nasional 3 (Transformasi ekonomi)	P2 : Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara			
	Prioritas Nasional 1 (supremaasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia)	P9 : Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif			
	Prioritas Nasional 6 (Transformasi ekonomi)	P12 : Menjamin Ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani			
	Prioritas Nasional 3 (Transformasi ekonomi)	P17 : Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif			
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;	Prioritas Nasional 2 (Transformasi ekonomi)	P14 : Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.	Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan inklusifitas sosial		

ASTA CITA	RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN RUDI-SENO	RKPD PROVINSI KALTIM 2026
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas Nasional 4 (Transformasi ekonomi)	P7 : Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia ; Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan (BPJS)	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
				Gratis Makanan Bergizi	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
	Prioritas Nasional 4 (Transformasi ekonomi)	P8 : Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi serta Digitalisasi		Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga S-3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
				Gratis Seragam Sekolah	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
	Prioritas Nasional 4 (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi)	P10 : Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas			
	Prioritas Nasional 8 (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi)	P17 : Peningkatan Prestasi Olahraga			
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Prioritas Nasional 2 (Transformasi Ekonomi)	P15 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumberdaya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Peningkatan hilirisasi dan pemantapan kawasan-kawasan industri berbasis komoditas unggulan daerah		
			Penguatan perekonomian sektor komoditas unggulan dan penyiapan kompetensi tenaga kerja		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Nasional 4 (Transformasi Sosial)	P5 : Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat	Gratis WIFI Internet di Seluruh Desa	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;

ASTA CITA	RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN RUDI-SENO	RKPD PROVINSI KALTIM 2026
	Prioritas Nasional 4)Transformasi ekonomi)	P13 : Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan		Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan;
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas Nasional 7 (supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia)	P3 : Reformasi Politik, Hukum dan Brokrasi	Pemantapan sistem merit ASN, Kelem- bagaan efektif dan kolaboratif, digi- talisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan pengu- atan pemberdayaan masyarakat		
			Peningkatan kapasi- tas antar pemangku dan pihak pelaksa- na pembangunan berdasarkan prin- sip-prinsip pemba- ngunan berkelanjut- an dan inklusi tas sosial		
			Penguatan keaman- an daerah dan pe- ningkatan partisipasi politik masyarakat		
			Penguatan kerja sama daerah dan memperkuat infra- struktur ekonomi lokal secara inklusif		
	Prioritas Nasional 7 (transformasi Tata kelola)	P4 : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
	Prioritas Nasional 8 (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi)	P6 : Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba			

ASTA CITA	RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN RUDI-SENO	RKPD PROVINSI KALTIM 2026
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas Nasional 2 (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi)	P11 : Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Optimalisasi penge- lolaan potensi SDA dalam meningkat- kan kualitas ling- kungan hidup		
			Peningkatan ketang- guhan dan tanggap bencana alam		
			Penguatan Sarana dan prasarana pendukung praktik kearifan tradisional dan Sosial Budaya		
	Prioritas Nasional 8 (Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi)	P16 : Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah		Gratis Haji dan Umrah untuk Marbot	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta penguatan budaya dan kearifan lokal

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim Tahun 2026

Berdasarkan Renstra Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2029, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi yaitu :

- Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi.
- Peningkatan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
- Peningkatan kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Berdasarkan isu strategis tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur adalah **“Optimalisasi Pemanfatan Hasil Riset dan Inovasi”**. Terwujudnya tujuan tersebut diukur

dengan terpenuhinya target pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai bahan/referensi perumusan kebijakan pembangunan, pengembangan dunia usaha, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis IPTEK dan Indeks Inovasi Daerah. Tujuan tersebut akan tercapai jika didukung oleh sasaran spesifik, terukur, jelas kriterianya dan memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun sasaran strategis Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TUJUAN : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai bahan/referensi perumusan kebijakan pembangunan, pengembangan dunia usaha, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis IPTEK	%	69.70	72.73	75.76	81.82	87.88
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62.87	64.00	65.13	66.26	67.39
SASARAN 1 yang mendukung tujuan : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan permasalahan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	60.61	66.67	72.73	78.79	84.85
	Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	51.85	55.56	59.26	62.96	66.67
SASARAN 2 yang mendukung tujuan : Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan riset dan inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	86.89	87.11	87.78	88.41	89.23
	Nilai SAKIP Balitbangda	Nilai/Predikat	75,87/BB	76,65/BB	77,13/BB	77,89/BB	78,32/BB

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Program dan kegiatan tahun 2026 disusun dengan memperhatikan :

- 1) Penyelarasan tematik riset dan inovasi dengan sasaran prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026.
- 2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026.
- 3) Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat daerah Tahun 2026.
- 4) Isu-isu strategis yang berkembang.
- 5) Strategi dan Arah kebijakan riset dan inovasi.
- 6) Regulasi yang berlaku.

Penyelarasan tematik riset dan inovasi telah diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang kemudian disinergikan dengan isu-isu strategis riset dan inovasi yang sedang berkembang seperti pemberdayaan potensi ekonomi, pengentasan kemiskinan, pencapaian SDGs dan pengembangan IPTEK. Hasil riset dan inovasi diharapkan dapat mendukung arah kebijakan riset dan inovasi, sesuai dengan peraturan atau kebijakan riset dan inovasi yang dipedomani. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 telah disesuaikan dengan efisiensi anggaran untuk mendukung Program GASPOL dan JOSPOL serta Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026 pada Bab 2.

Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat daerah Tahun 2026 telah dilaksanakan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur dengan output utama adalah sektor penelitian dan pengembangan dalam mendukung Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan hasil forum tersebut agar usulan kegiatan kabupaten/kota diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menjalin sinkronisasi dan koordinasi riset dan inovasi.

Isu strategis ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, baik internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi
2. Peningkatan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan
3. Peningkatan kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Strategi riset dan inovasi adalah pendekatan terencana untuk mencapai tujuan dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara arah kebijakan adalah panduan atau pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan strategi tersebut.

Strategi berfokus pada "bagaimana" mencapai tujuan, seperti membangun ekosistem riset yang kolaboratif dan kompetitif, sedangkan arah kebijakan menjelaskan "apa" yang ingin dicapai, seperti peningkatan daya saing nasional dan penciptaan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 3.3 Strategis dan Arah kebijakan riset dan inovasi Tahun 2025-2029

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan efektifitas penerapan regulasi terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan	Percepatan pengukuhan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)
	Penguatan Komitmen Stakeholders untuk memanfaatkan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan
	Peningkatan desiminasi dan pemahaman tentang manfaat hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan, secara intensif
Peningkatan upaya Hilirisasi Hasil Riset dan inovasi sebagai produk/layanan yang bermanfaat bagi masyarakat	Pengembangan skema kolaborasi pendanaan Hilirisasi Hasil Riset dan inovasi bersumber dari APBN, swasta dan Luar Negeri
	Pengembangan komersialisasi Hilirisasi Hasil Riset dan inovasi melalui kerjasama dengan dunia usaha
	Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi melalui penguatan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha
	Peningkatan Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas hilirisasi hasil Riset dan Inovasi
Peningkatan Kemampuan produksi Riset dan inovasi berkualitas untuk memenuhi kebutuhan peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah, secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas (kuantitas dan kualitas) Peneliti, Perekrut dan inovator di daerah
	Peningkatan penyelenggaraan riset dan inovasi antar wilayah dan antar sektor yang sinergi dan terpadu
	Peningkatan pendanaan riset dan inovasi melalui kolaborasi pendanaan di luar APBD
Peningkatan efektifitas Tata kelola pelayanan administrasi penyelenggaraan riset dan inovasi	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan
	Pembangunan pusat pengolahan data dan informasi (Big Data) sesuai kebutuhan riset dan inovasi berbasis teknologi informasi
	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penunjang penyelenggaraan riset dan inovasi

Regulasi utama yang berlaku untuk riset dan inovasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang diikuti oleh berbagai peraturan turunan seperti Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur pedoman pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Program-program tersebut turut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sesuai tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2026

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGUINDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		100 % 76	19.085.497.408			100 % 78	24.162.832.864
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		85%	264,921,600			90%	401.583.312
5.05.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	160,600,000	Dana Bagi hasil (DBH)		10 Dokumen	324.100.000
5.05.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,400,400	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	4.799.828
5.05.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,400,400	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	4.799.828

5.05.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,400,400	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	3.941.828
5.05.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,400,400	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	3.941.828
5.05.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Laporan	92,800,000	Dana Bagi hasil (DBH)		21 Laporan	53.192.000
5.05.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	1,920,000	Dana Bagi hasil (DBH)		5 Laporan	6.808.000
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya pergeseran anggaran belanja		3,80 %	15,037,605,556			0.07 %	16.558.804.994
5.05.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang/ Bulan	14,826,117,176	Dana Bagi hasil (DBH)		50 Orang/ Bulan	16.308.728.894
5.05.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	209,400,000	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Dokumen	242.040.000
5.05.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	1.000.000
5.05.01.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	1.000.000
5.05.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	536.100

5.05.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	480,080	Dana Bagi hasil (DBH)		30 Laporan	5.500.000
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian keberadaan Barang Milik Daerah terhadap catatan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		85,08%	2.568,300			88 %	2.568.300
5.05.01.1.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	480,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	480.000
5.05.01.1.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	536.100
5.05.01.1.03.004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	536.100
5.05.01.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	536,100	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	536.100
5.05.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	480,000	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	480.000
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan		60 %	7,200,000			60 %	256.560.000
5.05.01.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	0	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Paket	107.380.000
5.05.01.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7,200,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	11.180.000

5.05.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	0	Dana Bagi hasil (DBH)		35 Orang	90.000.000
5.05.01.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	0	Dana Bagi hasil (DBH)		30 Orang	48.000.000
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum berbasis elektronik		80 %	1,277,539,083			80 %	2.136.958.961
5.05.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	16,348,018	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Paket	41.528.741
5.05.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	18,060,745	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Paket	475.354.194
5.05.01.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	56,100	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Paket	58.024.876
5.05.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	42,402,700	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Paket	123.344.050
5.05.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	17,871,520	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Paket	118.707.100
5.05.01.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	48,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	121.000.000
5.05.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	1,068,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	1.150.000.000
5.05.01.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	49,800,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	32.000.000
5.05.01.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Kalimantan Timur	2 Dokumen	17,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Dokumen	17.000.000
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi		0	0			5,59%	1.426.429.420
5.05.01.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	600.000.000

5.05.01.1.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	156.431.520
5.05.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		10 unit	50.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	115.382.400
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	354.615.500
X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		-	-
5.05.01.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	50.000.000
5.05.01.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	50.000.000
5.05.01.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 unit	50.000.000
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Penunjang tugas BRIDA		85,98%	2,157,844,869			86,18%	2.601.489.876
5.05.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	3,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	15.000.000
5.05.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	555,504,869	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	616.265.876
5.05.01.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	35,500,000	Dana Bagi hasil (DBH)		12 Laporan	250.000.000
5.05.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	35 Laporan	1,563,840,000	Dana Bagi hasil (DBH)		35 Laporan	1.720.224.000
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		11,26%	337,818,000			12,01 %	778.437.998,00

5.05.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Kalimantan Timur	6 Unit	81,120,000	Dana Bagi hasil (DBH)		6 Unit	152.087.998
5.05.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Kalimantan Timur	6 Unit	199,456,000	Dana Bagi hasil (DBH)		6 Unit	199.456.000
5.05.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Kalimantan Timur	90 Unit	46,090,000	Dana Bagi hasil (DBH)		90 Unit	49.302.000
5.05.01.1.09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Unit	44.400.000
5.05.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	2 Unit	242,000	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Unit	233.772.000
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	3 Unit	10.780.000	0.00		0	10.780.000
5.05.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	2 Unit	130,000	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Unit	88.640.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran		18 %	5,078,554,592	Dana Bagi hasil (DBH)		18 %	9.652.875.405
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dari hasil fasilitasi dan riset bidang pemerintahan dan peraturan/regulasi		64,29%	603,560,000	Dana Bagi hasil (DBH)		68,57%	2.077.315.966
5.05.02.1.01.001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	317.966.442

5.05.02.1.01.002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	2 Laporan	252,920,000	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Laporan	471.500.442
5.05.02.1.01.003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	297.043.462
5.05.02.1.01.005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	100,120,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	288.110.442
5.05.02.1.01.006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0

5.05.02.1.01.009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	250,520,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	250.520.000
5.05.02.1.01.012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	231.119.716
5.05.02.1.01.013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Rekomendasi	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Rekomendasi	221.055.462
5.05.02.1.01.014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0
5.05.02.1.01.015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Rekomendasi	0	Dana Bagi hasil (DBH)		0	0

5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah dari hasil riset bidang sosial dan kependudukan		58,33%	1,041,282,000			63,33%	1.869.058.596
5.05.02.1.02.001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	251,240,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	276.364.000
5.05.02.1.02.002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	185,360,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	203.896.000
5.05.02.1.02.003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	302,651,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	332.916.100
5.05.02.1.02.004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	53.089.020
5.05.02.1.02.005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	229.101.648
5.05.02.1.02.006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	302,031,000	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	332.234.100
5.05.02.1.02.007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	53.089.020
5.05.02.1.02.008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	53.089.020
5.05.02.1.02.009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	229.101.648
5.05.02.1.02.010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	53.089.020
5.05.02.1.02.011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	53.089.020

5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah dari hasil riset bidang ekonomi dan Pembangunan		60,00%	1,641,396,744			66,92%	3.033.817.118
5.05.02.1.03.001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	140,466,850	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	268.560.220
5.05.02.1.03.002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	140,466,850	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	268.560.220
5.05.02.1.03.003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	169.085.628
5.05.02.1.03.004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	140,118,040	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	194.111.417
5.05.02.1.03.005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	140,904,690	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	169.085.628
5.05.02.1.03.006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	152,563,774	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	183.076.529
5.05.02.1.03.007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	147,763,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	477.315.708
5.05.02.1.03.008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	145,693,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	274.831.708
5.05.02.1.03.009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	196,121,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	235.345.308
5.05.02.1.03.010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	144,353,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	173.223.708
5.05.02.1.03.011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	146,480,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	275.776.108

5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	146,466,090	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	175.759.308
5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	169.085.628
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten		60,00 %	1,792,315,848			67,00 %	2.672.683.723
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	168,075,932	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Dokumen	306.151.864
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	23,000,756	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	311.932.088
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	3 Laporan	1,194,996,200	Dana Bagi hasil (DBH)		3 Laporan	1.333.995.440
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	2 Laporan	188,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		2 Laporan	395.356.040
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	218,242,960	Dana Bagi hasil (DBH)		1 Laporan	325.248.293
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief) Persentase pengembangan hasil inovasi dan inovasi		52,94% 45,71%	200,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		64,71% 51,43%	650.000.000
5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase sinergi program kegiatan antar sektor dan antar wilayah sesuai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK		41,18%	200,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		52,94%	450.000.000

5.05.03.1.01.003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	5 Naskah	200,000,000	Dana Bagi hasil (DBH)		6 Naskah	300.000.000
	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 dokumen	150.000.000
	Invensi dan Inovasi	Persentase realisasi kerjasama/kolaborasi/ke mitraan riset, invensi dan inovasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		47,06%	200.000.000
	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 laporan	100.000.000
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur	0	0	Dana Bagi hasil (DBH)		1 laporan	100.000.000
24.364.052.000							34.465.708.265		

Berdasarkan tabel tersebut teridentifikasi bertambahnya Program Riset dan Inovasi Daerah, program tersebut bertujuan mendukung pengambilan kebijakan berbasis riset, penguatan ekosistem inovasi, dan peningkatan daya saing daerah melalui integrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lebih lanjut program riset dan inovasi daerah tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah mengalami perubahan target dan indikator kinerja secara sepihak oleh Bappeda Prov. Kaltim, yang semula “Persentase pemenuhan kebutuhan layanan penyelenggaraan Riset dan Inovasi” menjadi “Indeks Kualitas Layanan Keskretariat” dan “Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti”.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung penyelenggaraan urusan penunjang pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2026 telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan.

Total pendanaan sebesar Rp. 24.364.052.000,- terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah Rp. 19.085.497.408,-, program penelitian dan pengembangan daerah Rp. 5.078.554.592,- dan program riset dan inovasi daerah Rp. 200.000.000,-.

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tersebut terlampir pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				24.364.052.000				22.833.521.000
1	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100	19.085.497.408			100	20.364.257.610
							Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		76%				78%	
	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	97,50%	85%	264.921.600			90%	966.756.918
	5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dokumen	10 dokumen	160.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	10	331.870.702
	5	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	5 dokumen	1 dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Dokumen	4.799.828
	5	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	5 dokumen	2 dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	47.998.280
	5	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	5 dokumen	3 dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	3.941.828
	5	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	5 dokumen	4 dokumen	2.400.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	39.418.280
	5	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi	105 laporan	21 laporan	92.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	21 Laporan	531.920.000
	5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	5 Laporan	1.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	5 Laporan	6.808.000
	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya pergeseran anggaran belanja	1,10%	3,80%	15.037.605.556			0.07 %	13.071.312.122

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	366 orang	68 orang/bulan	14.826.117.176	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	50 Orang/ Bulan	12.819.078.698
	5	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	209.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 dokumen	242.040.000
	5	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	1 dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	723.000
	5	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	1 dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	579.500
	5	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	1 dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	3.894.000
	5	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	150 dokumen	30 Laporan	480.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	30 Laporan	4.996.924
	5	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian keberadaan Barang Milik Daerah terhadap catatan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	86,74%	85,08%	2.568.300			88 %	9.246.100
	5	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	1 dokumen	480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	2.600.000
	5	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	1 dokumen	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	2.600.000
	5	05	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1 laporan	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	536.100
	5	05	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	12 Laporan	536.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	910.000
	5	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	12 Laporan	480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	2.600.000
	5	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi Pegawai	88,23%	76,47%	7.200.000			60%	149.180.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	Paket			DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Paket	0
	5	05	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	1 Dokumen	7.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	11.180.000
	5	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 pegawai	35 Orang			DANA BAGI HASIL (DBH)	35 Orang	90.000.000
	5	05	01	1.05	00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151 pegawai	30 Orang			DANA BAGI HASIL (DBH)	30 Orang	48.000.000
	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pemenuhan kebutuhan bahan pelayanan umum kantor	96%	80%	1.277.539.083			80 %	2.028.517.153
	5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 paket	1 Paket	16.348.018	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	41.528.741
	5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	2 Paket	18.060.745	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	646.128.495
	5	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 paket	3 Paket	56.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	58.024.876
	5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	4 Paket	42.402.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	81.080.750
	5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	5 Paket	17.871.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	118.707.100
	5	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 laporan	1 laporan	48.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	100.000.000
	5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 Laporan	1.068.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	934.647.191
	5	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	49.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	31.400.000
	5	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	2 Dokumen	17.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Dokumen	17.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	7,19%					5,59%	54.749.714
	5	05	01	1.06	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	0
	5	05	01	1.06	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	52.143.840
	5	05	01	1.06	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	10 unit	5.874
	5	05	01	1.06	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	2 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	0
	5	05	01	1.06	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	2 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	0
	5	05	01	1.06	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	2.600.000
	5	05	01	1.06	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	0
	5	05	01	1.06	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 unit	0
	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas BRIDA	88,58%	3,99%	2.157.844.869			86,18%	3.865.697.609
	5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	12 Laporan	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	15.000.000
	5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	60 laporan	12 Laporan	555.504.869	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	560.241.705
	5	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 laporan	12 Laporan	35.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	390.412.800

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	142 laporan	35 Laporan	1.563.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	35 Laporan	2.900.043.104
	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Penunjang tugas BRIDA	13,51%	85,98%	337.818.000			12,01%	218.797.994
	5	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	6 unit	81.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6 Unit	152.087.998
	5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	6 unit	199.456.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6 Unit	0
	5	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	440 unit	90 unit	46.090.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	90 Unit	49.302.000
	5	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	0		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Unit	0
	5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	242.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Unit	0
	5	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	2 unit	10.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	10.150.000
	5	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 Unit	130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Unit	7.257.996
2	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isustrategis/ permasalahan dan potensi unggulan daerah	84,85%	75,76%	5.078.554.592			78,79%	1.469.263.390
							Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/naskah akademis rancangan perda/pergub	84,85%	75,76%				78,79%	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI)	84,85%	75,76%				78,79%	
	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan pembangunan dari hasil fasilitasi dan riset bidang pemerintahan dan peraturan/regulasi	78.57%	64.29 %	603.560.000			68,57%	359.263.390
	5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 laporan	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	40.000.000
	5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	10 laporan	2 Laporan	252.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Laporan	40.000.000
	5	05	02	1.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5 laporan	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	47.263.390
	5	05	02	1.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	5 laporan	1 Laporan	100.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	122.000.000
	5	05	02	1.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	02	1.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Badan Usaha Milik Desa	0	1 Laporan	250.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	30.000.000
	5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Rekomendasi	40.000.000
	5	05	02	1.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.01	0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah dari hasil riset bidang sosial dan kependudukan	75%	58.33 %	1.041.282.000			63,33%	170.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5 dokumen	1 Dokumen	251.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000
	5	05	02	1.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7 dokumen	1 Dokumen	185.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	8 dokumen	1 Dokumen	302.651.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.02	0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	3 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	3 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan kesehatan	5 dokumen	1 Dokumen	302.031.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.02	0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02	0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	4 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	20.000.000
	5	05	02	1.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	02	1.02	0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	3 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah bidang ekonomi dan Pembangunan dari hasil riset	80%	60 %	1.641.396.744			66,92%	450.000.000
	5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 dokumen	1 Dokumen	140.466.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	50.000.000
	5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5 dokumen	1 Dokumen	140.466.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000
	5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	4 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	0
	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5 dokumen	1 Dokumen	140.118.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	5 dokumen	1 Dokumen	140.904.690	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	5 dokumen	1 Dokumen	152.563.774	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	5 dokumen	1 Dokumen	147.763.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	50.000.000
	5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	5 dokumen	1 Dokumen	145.693.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000
	5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5 dokumen	1 Dokumen	196.121.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	5 dokumen	1 Dokumen	144.353.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	40.000.000
	5	05	02	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 dokumen	1 Dokumen	146.480.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	02	1.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan penataan ruang dan pertanahan	5 dokumen	1 Dokumen	146.466.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000
	5	05	02	1.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	4 dokumen	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	30.000.000
	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi inovasi baru berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten	80%	60 %	1.792.315.848			67,00%	490.000.000
	5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	13 laporan	1 Dokumen	168.075.932	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	100.000.000
	5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	13 laporan	1 Laporan	23.000.756	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	100.000.000
	5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	15 laporan	3 Laporan	1.194.996.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	3 Laporan	100.000.000
	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	14 laporan	2 Laporan	188.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Laporan	90.000.000
	5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5 laporan	1 Laporan	218.242.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	100.000.000
3	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief)	88,24%	52,94%	200.000.000			64,71%	1.000.000.000
							Persentase pengembangan hasil invensi dan inovasi	62,86%	45,71%				51,43%	
	5	05	03	1.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase sinergi program kegiatan antar sektor dan antar wilayah sesuai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK	76,47%	41,18%	200.000.000			52,94	650.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra (2029)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	05	03	1.01	0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	3 laporan	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	650.000.000
	5	05	03	1.01	0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	28 naskah	5 Naskah	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	0	0
	5	05	03	1.02		Invensi dan Inovasi	Persentase realisasi kerjasama/ kolaborasi/kemitraan riset, invensi dan inovasi	70,59%					47,06%	350.000.000
	5	05	03	1.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	4 laporan	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	175.000.000
	5	05	03	1.02	0013	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	4 laporan	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	175.000.000

Indikator dan target kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah hasil internalisasi oleh Bappeda Prov. Kaltim, sehingga Indikator dan target kinerja pada Renja 2026 menyesuaikan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009